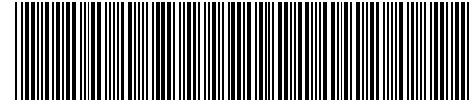




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.309113/2026**



DS:9336-7117-9066-5397

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
- Sebesar : Rp. 191.200.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.04.BF.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Jumlah Uang
Rp. 191.200.000
Rp. 191.200.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	191.200.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B I M A (071) Rp. 191.200.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



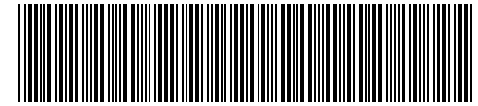
DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : I A. 1

Program	: 005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	191.200.000
Kegiatan	: 1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	191.200.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	
	: 2. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama	
	: 3. 01	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama	
	: 4. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	
	: 5. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	
	: 6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	
	: 7. 01	Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal	
	: 8. 02	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama	
	: 9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	
	: 10. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	
	: 11. 03	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama	
	: 12. 04	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	
	: 13. 05	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	
	: 14. 06	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	
	: 15. 07	Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama	
	: 16. 08	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dilingkungan peradilan agama	
	: 17. 09	Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	
	: 18. 10	Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	
	: 19. 11	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	: 20. 12	Jumlah pelaksanaan koordinasi terhadap layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : I A. 2

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

21. 13 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator internal

Klasifikasi Rincian Output 1	:	1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		980,00	Orang	98.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.003	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (PN)	980,00	Orang	98.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		170,00	Perkara, Berkas Perkara	93.200.000
Rincian Output	:	01	QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (PN)	50,00	Perkara	18.200.000
		02	QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung (PN)	120,00	Perkara	75.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026

I B. SUMBER DANA



DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
 Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
 Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	191.200.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	191.200.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	-	191.200	-	-	-	191.200		
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	191.200	-	-	-	191.200		
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	191.200	-	-	-	191.200		
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (23.52 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA BIMA)	-	98.000	-	-	-	98.000	23 . 52	
01	RM	-	98.000	-	-	-	98.000	071	
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (23.52 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA BIMA)	-	93.200	-	-	-	93.200	23 . 52	
01	RM	-	93.200	-	-	-	93.200	071	
JUMLAH		-	191.200	-	-	-	191.200		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	309113	PENGADILAN AGAMA BIMA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.948	191.200
		BELANJA BARANG	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.948	191.200
	005.04.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.948	191.200
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.932	15.948	191.200
		PERKIRAAN PENERIMAAN	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822	14.803	177.845
		- PNBP (425233)	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642	5.633	67.695
		- PNBP (425239)	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	9.170	110.150

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026
IV A. B L O K I R**



DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [309113] PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.309113/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:9336-7117-9066-5397

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [309113] PENGADILAN AGAMA BIMA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004